

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

---

- Tahun Sidang : 2016-2017  
Masa Persidangan : V  
Rapat Ke- : 15  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Selasa, 11 Juli 2017  
Waktu : Pukul 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK-IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
- Acara : Membahas penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga tahun 2018 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan membahas RKA-K/L dalam RUU APBN-P Tahun 2017
- Ketua Rapat : Edhy Prabowo, MM., MBA.  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 38 Anggota dari 49 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:
1. Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan);
  2. Ir. Rifky Efendi Hardijanto (Sekretaris Jenderal);
  3. Dr. Muhammad Yusuf, SH., MM. (Inspektur Jenderal);
  4. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap)
  5. DR.Ir. Slamet Soebjakto M.Si. (Direktur Jenderal Perikanan Budidaya);
  6. Dr. Ir. Eko Djalmo Asmadi, MH. (Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan);
  7. Brahmantya Satyamurti Poerwadi, ST. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut);
  8. Ir. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan);
  9. M. Zulficar Mochtar, ST., M.Sc. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan); dan
  10. Dr.Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan)
- beserta jajarannya.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga tahun 2018 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR-RI dan membahas RKA-K/L dalam RUU APBN-P Tahun 2017, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, dibuka pukul 15.00 WIB oleh Ketua Rapat Edhy Prabowo, MM., MBA dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas Pagu RAPBN Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 sebesar Rp7.328.707.475.000,- yang bersumber dari:
  - a. Rupiah Murni sebesar Rp7.199.475.846.000,-;
  - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp92.733.287.000,-; dan
  - c. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp36.498.342.000,-

dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp423.513.360.000,-;
- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp73.117.458.000,-;
- c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp1.280.771.688.000,-;
- d. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp944.857.746.000,-;
- e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp813.454.764.000,-;
- f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp785.003.713.000,-;
- g. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp683.921.318.000,-;
- h. Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.794.291.684.000,-; dan
- i. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp529.775.744.000,-.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas bersama Eselon I pada siklus anggaran selanjutnya.

2. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas penghematan/pengurangan anggaran pada APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 sebesar Rp360.066.222.000,- yang terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp352.036.000.000,- dan PNBP sebesar Rp8.030.222.000,-.
3. Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan atas usulan APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 sebesar Rp198.809.172.000,- yang dialokasikan untuk:
  - Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp188.809.172.000,- (Rupiah Murni dan Hibah); dan
  - Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp10.000.000.000,-.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas bersama Eselon I sebelum ditindaklanjuti kepada Badan Anggaran DPR RI untuk menjadi bagian dari RUU tentang Perubahan APBN TA 2017.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan program masyarakat nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperbaiki tata laksana dan kepatuhan pelaksanaan APBN agar mencapai kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.40 WIB.

MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

**SUSI PUDJIASTUTI**

KOMISI IV DPR RI  
KETUA RAPAT,

Ttd.

**EDHY PRABOWO, MM., MBA.**  
**A-335**